



SURAT PERNYATAAN
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
NOMOR : B/000.8.3.4/38.a/S.Ket/PUPP.1/2026

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: RODI YANTARI, S.T.,M.M.,M.T.
NIP	: 197701112006041015
Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda /IV/c
Jabatan	: Kepala Dinas

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta menjamin hak-hak masyarakat atas informasi yang transparan, akuntabel, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Berita Acara / Lembar Pengujian Konsekuensi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/000.8-3.4/925.2/DKI-SET/2025.

Dengan ini menerangkan bahwa:

a) **Pengujian & Klasifikasi Informasi:**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemetaan, klasifikasi, serta Pengujian Konsekuensi terhadap seluruh dokumen, data, dan informasi publik yang dikuasai dan dikelola pada unit kerja Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau.

b) **Daftar Informasi Publik (DIP):**

Seluruh Informasi Publik yang dikategorikan sebagai **Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat** telah dihimpun ke dalam **Daftar Informasi Publik (DIP)** Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau dan dinyatakan terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat umum melalui portal PPID / layanan informasi resmi Dinas PUPP.

c) **Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK):**

Informasi yang dikategorikan sebagai **Informasi yang Dikecualikan (DIK)** sebagaimana tertuang dalam Lembar Pengujian Konsekuensi mencakup kelompok Informasi Keuangan Pribadi, Informasi Pengawasan/Audit Internal/BPK, Dokumen Pengadaan & Kontrak/BoQ/As-Built Drawing, Kepegawaian, Hukum, Penelitian/HKI, serta Spesifikasi Teknis/Trase Jalan Strategis dinyatakan **DITUTUP / DIBATASI AKSESNYA** untuk publik guna mengantisipasi penyalahgunaan informasi, melindungi rahasia pribadi, menjaga hak atas kekayaan intelektual (HKI), mencegah persaingan usaha tidak sehat, serta menjaga keamanannya sesuai batas waktu pengecualian yang telah ditentukan.

d) **Kepatuhan Prosedur Pengujian Konsekuensi:**

Penetapan pengecualian informasi publik ini telah melalui proses Pengujian Konsekuensi yang sah bersama Tim Penguji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Asisten Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum) serta telah memperoleh persetujuan resmi dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Atasan PPID Utama.

e) **Peninjauan Berkala & Perubahan Status:**

Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau siap melakukan peninjauan kembali dan/atau membuka akses atas Informasi yang Dikecualikan apabila batas waktu pengecualian telah berakhir, telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan/pejabat berwenang, atau berdasarkan putusan komisi informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai pedoman dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 23 Juni 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,



Rodi Yantari, S.T., M.M., M.T.
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP 197701112006041015

Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Nomor : B/000.8.3.4/38.a/S.Ket/PUPP.1/2026

Tanggal : 23 Juni 2026

Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik Tahun 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Informasi			
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Disediakan Setiap Saat	Wajib Diumumkan Serta Merta	Informasi yang Dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Alamat Lengkap Instansi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
2	Ruang Lingkup (Kewenangan) Instansi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
3	Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
4	Struktur Organisasi Instansi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
5	Profil Singkat Pimpinan Tertinggi Instansi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
6	LHKPN Pimpinan Tertinggi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
7	LHKPN Pejabat Eselon III	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
8	LHKPN Pejabat Eselon IV & Fungsional	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	2 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
9	Data/Persentase Wajib LHKASN	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
10	Rencana Kerja dan Anggaran (RKAD/DPA)	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
11	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan yang Telah Dijalankan	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
12	Laporan Keuangan Telah Diaudit - LRA, Neraca, CALK, Daftar Aset 2025	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
13	Rencana Umum Pengadaan (RUP) / SIRUP 2025	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	2 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
14	Rencana Umum Pengadaan (RUP) / SIRUP 2026	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Informasi			
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Disediakan Setiap Saat	Wajib Diumumkan Serta Merta	Informasi yang Dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Prosedur & Pengumuman Layanan Publik Tata Cara Permohonan Informasi Publik	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
16	Prosedur & Pengumuman Layanan Publik Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
17	Prosedur & Pengumuman Layanan Publik Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
18	Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
19	Kajian Akademik Peraturan yang Disahkan	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
20	Informasi/Kebijakan dalam Pertemuan Terbuka	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
21	Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktunya	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	3 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun	√			
22	Daftar Informasi Publik (DIP)	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
23	SK Pembentukan dan Susunan Tim PPID	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
24	Maklumat Pelayanan PPID	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
25	SOP Pelayanan Informasi Publik	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
26	Perjanjian Kerja Sama (MoU/PKS) dengan Pihak Ketiga	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
27	Surat Perjanjian Kemitraan	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
28	Surat Perjanjian Swakelola	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
29	Daftar Dokumen Kontrak	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
30	Surat Menyurat Pimpinan/Pejabat	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
31	Persyaratan & Izin yang Diterbitkan	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Informasi			
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Disediakan Setiap Saat	Wajib Diumumkan Serta Merta	Informasi yang Dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Pelanggaran Pengawasan Internal	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
33	Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun		√		
34	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun			√	
35	Informasi Serta Merta	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun			√	
36	Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	Fungsional Perencana	Fungsional Perencana	1 Tahun	Hard copy dan Soft copy	1 tahun				√

Jenis Informasi : Diisi dengan memberikan tanda (√)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

